**Relasi Politik di Kabupaten Maros
(Studi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020
Provinsi Sulawesi Selatan)**

Adi Sumandiyar¹, Muhammad Yahya², Umar Kamaruddin³, Hasruddin Nur⁴, Arda⁵

¹³⁴⁵ Sosiologi, Universitas Sawerigading Makassar, Indonesia

² Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia.

¹Email: adisumandiyar@gmail.com

Abstract. This study aims to obtain in-depth interview about Political Relations in Maros Regency in the Study of Simultaneous Regional Head Elections in 2020 South Sulawesi Province. The researcher collected discourse data through electronic media, and the researcher acted as a research instrument on the political relations between the rulers and the community in the 2020 Regional Head Election contestation in Maros Regency. Sources of data are through documentation and informants, while data collection techniques are carried out through in-depth interviews which are located in Maros Regency, South Sulawesi Province. The research informants were 2 people, selected by purposive random sampling. The results showed that it developed in two dimensions, namely; subjective dimension and objective dimension. The subjective dimension is obtained through; (1) network of government actors and bureaucracy; (2) retainer network; and (3) community empowerment group networks can mobilize community support, while the subjective dimension is through creating client patrons.

Keywords: Political relations, simultaneous regional elections, the interests of multi actors and client patrons.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang Relasi Politik Studi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti mengumpulkan data wacana melalui media elektronik, serta peneliti bertindak selaku instrumen penelitian tentang relasi relasi politik penguasa dengan masyarakat pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros. Sumber data melalui dokumentasi dan informan, sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui metode wawancara mendalam yang berlokasi di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Informan penelitian sebanyak 2 Orang, dipilih dengan cara *purposive random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkembang dalam dua dimensi, yakni; dimensi subjektif dan dimensi objektif. Dimensi subjektif diperoleh cara melalui; (1) jejaring aktor pemerintahan dan birokrasi; (2) jejaring punggawa; dan (3) jejaring kelompok pemberdayaan masyarakat dapat menggalang dukungan masyarakat, sementara dimensi subjektif melalui cara menciptakan *patron klien*.

Kata Kunci: Relasi politik, pilkada serentak kepentingan multi aktor dan patron klien.

Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Relasi kelompok penguasa dengan kelompok pengusaha pada atmosfer politik tumbuh dan berkembang dalam dua dimensi, yakni; subjektif dan objektif memiliki pengaruh secara resiprokal dalam memproduksi hingga mereproduksi wacana (Sumandiyar, A, 2017a). Relasi politik tersebut juga tertuang dalam hubungan bagi pengusaha dalam memberikan dukungan kepada kontestan politik (Sumandiyar, A, 2017b). Selanjutnya pola relasi tertuang dalam atmosfer politik bermula dari pengusaha memberikan dukungan kepada penguasa yang berkontestasi dalam kemenangan politik (Sumandiyar, A. 2018). Dalam proses perubahan sosial yang dikondisikan oleh perubahan kondisi lingkungan pada tatanan sosial masyarakat yang saat ini terdapat perubahan (Sumandiyar, A. 2019).

Dalam perkembangannya terdapatnya hubungan diantara kekuasaan dengan kepentingan yang hanya memanfaatkan peluang dan kesempatan guna merebut sebuah kursi kekuasaan dengan mengesampingkan kualitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh para kontestan politik (Sumandiyar, A. 2017c). Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil pemilihan gubernur Banten, Ratu Atut yang memenangi kontestasi Pilgub tahun 2006. Dari hasil Pilgub 2006, telah melahirkan relasi dinasti yang tidak hanya pada aspek politik, melainkan juga menyebar ke bidang lainnya (arena bisnis, sosial, budaya, kepemudaan, hingga pada ormas) (Sutisna, A, 2017).

Pilkada serentak sebagai sebuah konsep elektoral yang diharapkan dapat membawa perubahan secara signifikan dan memiliki perbedaan yang menonjol dalam konstruksi koalisi pemerintahan pada tingkat lokal tidak terjadi dan tidak memiliki ciri (Nurhasim, M. 2018). Dalam menelusuri format sistem pilkada langsung pada dasarnya tidak sekali jadi. Adanya UU tentang pemilihan kepala daerah seringkali mengalami perubahan dengan melakukan beberapa kali revisi (disebabkan terjadi politik uang (*money politics*) dan terdapat oknum kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi) (Romli, L, 2018).

Secara umum, pelaksanaan pilkada adalah dalam rangka mencari sosok kepala daerah memiliki tugas membentuk pemerintahan yang akuntabel dan bersih serta berintegritas (Noor, F, 2018). Dari fenomena pilkada langsung ini juga seringkali memunculkan fenomena

politik kekerabatan yang keberadaannya semakin menguat dipengaruhi oleh peluang, misalnya melalui pemilihan kepala daerah secara langsung maupun pemilu dengan sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak, serta munculnya partai-partai baru. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh keluarga politik dengan mengoptimalkan jaringan politik, sosial dan kekerabatan, sehingga memperoleh dukungan publik yang cukup besar (Purwaningsih, T, 2015). Sesungguhnya pilkada serentak perlu pembenahan, tapi upaya untuk memberi ruang partisipasi politik bagi rakyat tetap perlu diapresiasi (Akbar, I, 2016).

Partisipasi politik dalam Pilkada merupakan bagian dari partisipasi politik secara umum. Partisipasi politik warga negara dalam Pilkada merupakan partisipasi elektoral (*voter turnout*). Partisipasi sebagai mekanisme demokrasi haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu yang harus ada dalam Pilkada yang demokratis adalah partisipasi warga Negara (Sutrisno, C, 2017). Terdapatnya penurunan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor tersebut adalah yang memiliki pengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat yang belum maksimal pada pilkada serentak di Sulawesi Selatan Tahun 2015 ialah faktor sosial, budaya, politik, administrasi dan pekerjaan (Lisma dan Tyesta, L, ALW, 2017).

Pilkada serentak menyederhanakan waktu pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara bersamaan dengan semangat efektif dan efisien dalam demokrasi (Chaniago, PS. 2016). Pilkada serentak juga tidak terlepas dari pembentukan sebuah prinsip komunitas yang pada dasarnya membangun sebuah interaksi sosial diantara satu individu dengan yang lainnya. Komunitas tersebut sengaja dibangun untuk memberikan simpatik bagi warga yang lainnya, sehingga mereka memiliki keterkaitan dalam rangka bersama-sama menyukseskan sebuah tujuan (Syarifuddin, Abustam, I., Adam, A., & Sumandiyar, A. 2019). Faktor institusional seperti panitia penyelenggara pemilu bila mana tidak berlaku transparan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik (Amiruddin, A. 2017).

Pada pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020, terasa sedikit berbeda dari pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada pilkada

tahun ini akan dilaksanakan ditengah Pandemi Covid-19. Proses Pilkada jelas terasa sangat berbeda mulai dari tahapan penjangkaran paslon sampai pada proses kampanye. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan aturan untuk membatasi semua pergerakan dan jumlah massa dari setiap paslon yang melakukan kampanye. Langkah ini dilakukan agar bisa memetus dan mengurangi dampak penyebaran Virus Corona dimasyarakat dalam proses berlangsungnya Pilkada serentak.

Dalam hal ini, pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Maros terdapat 3 pasangan Bakal Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang telah mendeklarasikan dirinya, yakni; (1) pasangan Chaidir Syam, (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros) dan Hj. Suhartina Bohari (Mantan Caleg DPR RI) dimana pasangan ini memiliki relasi keluarga dengan H.M.Hatta Rahman (Bupati Maros Periode 2015-2020). Perlu diketahui bahwasanya saat ini peran H.M. Hatta Rahman di Kabupaten Maros masih menjadi panutan oleh para pengikut setianya. Hal tersebut dibuktikan pada struktur sistem pemerintahan Daerah di Kabupaten Maros umumnya masih didominasi oleh simpatisan dari H.M. Hatta Rahman. Baik pada level Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Kecamatan, Kepala Bagian hingga Kepala Seksi yang tersebar di Kabupaten Maros. Situasi tersebut yang memungkinkan menjadi modal bagi pasangan Chaidir Syam dan Suhartina Bohari lebih percaya diri dalam menggalang pendukungnya; (2) Pasangan H.A. Harmil Mattotorang (Wakil Bupati Maros Periode 2015-2020) dan Andi Ilham Nadjamuddin (adalah Putra H.A.Nadjamuddin Aminullah adalah Bupati Maros Periode 1990-2009). Perlu diketahui bahwa, pasangan ini juga memiliki relasi sosial dengan masyarakat yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari garis keturunan dari H.A. Harmil Mattotorang dan Andi Ilham Nadjamuddin adalah merupakan keturunan dari Kerajaan Lau dan Kerajaan Turikale yang terletak di Kecamatan Lau dan Kecamatan Turikale dimana hubungan relasi sosialnya sudah terbangun dan berjalan secara harmoni dan baik dengan pendukung fanatiknya; (3) Pasangan Tajerimin dan Havied Fasha saat ini mendapatkan dukungan dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Saat ini posisi Tajerimin merupakan salah satu pengurus Partai Golkar dan Havid Fasha merupakan anggota legislative periode 2019-2024 dari Partai PBB. Oleh sebab itu, maka

penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana relasi politik penguasa dan masyarakat pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros?

METODE

Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Dalam pengumpulan datanya, peneliti mengumpulkan data wacana melalui media elektronik, serta peneliti bertindak selaku instrumen penelitian. Data dikumpulkan ialah relasi relasi politik penguasa dengan masyarakat pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros. Data tersebut diperoleh melalui dua sumber data, yakni; dokumentasi dan informan, sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui metode wawancara mendalam. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif dimaksudkan untuk melihat proses, makna, dan efek dari fenomena sosial yang ada.

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 2 Orang yang dipilih dengan cara *purposive random sampling*. Jenis data penelitian yang diperlukan adalah data primer berupa praktik diskursif dan data sekunder yang menyertai fenomena relasi penguasa dan masyarakat di Kabupaten Maros. Tahapan pengumpulan dan analisis data mengikuti alur siklus, interaktif, dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data menjadi jenuh. Konsep tersebut meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion: drawing/verifying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Relasi politik penguasa dengan masyarakat

Relasi politik penguasa dengan masyarakat terbangun atas dasar pertimbangan kepentingan politik. Dasar terbangun melalui jalur relasi, yaitu; (1) jejaring aktor pemerintahan dan birokrasi; (2) jejaring punggawa; dan (3) jejaring kelompok pemberdayaan masyarakat. Dari ke tiga uraian pokok tersebut, terdapat tujuan besar yaitu menarik simpatisan dan membangun pemilih fanatik dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros. Seperti misalnya pada kasus pemilihan Anggota Legislatif yang pada Tahun 2019 dilaksanakan, dapat diketahui bahwasanya terdapat kemenangan besar dari

Partai Golkar, Partai PAN dan Partai Nasdem, masing-masing memiliki Calon Kepala Daerah yakni Partai Golkar mengusung Pasangan Tajerimin dan Havid Fasha, Partai Nasdem mengusung pasangan Andi Harmil Mattotorrang dan Andi Ilham Nadjamuddin dan sementara dari Partai PAN mengusung pasangan Chaidir Syam dan Suhartina Bohari. Proses tersebut membentuk jejaring piramida yang secara struktural memiliki fungsi untuk menyalurkan kepentingan aktor politik dari puncak piramida dan sebaliknya menjamin dukungan politik dari dasar piramida dengan sasaran utama adalah masyarakat kelas bawah (*grass root community*). Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan informan penelitian AS (37 tahun) salah satu Birokrat di Kabupaten Maros, bahwasanya untuk jejaring aktor pemerintahan birokrasi maka dapatlah dikatakan pasangan Calon Kepala Daerah Andi Harmil Mattotorrang dan Andi Ilham Nadjamuddin memiliki kans yang besar. Mengingat pasangan ini memiliki distribusi dukungan di hampir seluruh lini birokrasi yang terdapat di 14 Kecamatan di Kabupaten Maros. Saat ini Andi Harmil Mattotorrang adalah Wakil Bupati Maros yang juga memiliki klan politik terhadap birokrasi di Kabupaten Maros. Selanjutnya untuk pasangan Chaidir Syam dan Suhartina Bohari juga memiliki distribusi dan pengaruh politik terhadap sistem birokrasi di Kabupaten Maros. Mengingat saat ini pasangan Chaidir Syam dan Suhartina mendapat dukungan dari Bupati Hatta Rahman, meskipun secara tidak secara terbuka. Sementara itu, hubungan pasangan Calon Kepala Daerah Chaidir Syam dan Suhartina dengan birokrasi pemerintahan dapat dikatakan harmoni, dimana Chaidir Syam pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maros dimasanya. Sementara untuk pasangan Tajerimin dan Havid Fasha dalam hubungan dengan birokrasi pemerintahan juga dapat dikatakan berjalan dengan baik, mengingat pasangan ini didukung oleh Partai Golkar dimana Ketua Partai Golkar juga memiliki andil yang besar dalam hal penentuan posisi jabatan di Kabupaten Maros.

2) Relasi politik penguasa dengan partai politik

Secara umum fenomena Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros memiliki beragam macam fenonema wacana yang digelontorkan oleh para calon kontestan menjelang pemilihan, diantaranya adalah salah satu pasangan Chaidir-Suhartina Bohari yang

diklaim unggul secara elektabilitas suaranya. Hal tersebut berdasarkan hasil yang dilakukan oleh lembaga Script Survei Indonesia (SSI). Pasangan yang menggunakan *tagline Hati Kita Keren*, terpaut jauh dari pasangan lainnya. Pasangan ini sudah resmi mendapatkan rekomendasi dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan 43,54 persen. Selanjutnya pasangan Harmil Mattotorrang-Andi Ilham Najamuddin dengan angka 26,22 persen. Setelah itu, pasangan ketiga yakni, Tajerimin-Hafid Fasha dengan 5,00 persen.

Selanjutnya Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Maros, Amirullah Nur Saenong, telah siap untuk bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Maros 2020. Dalam perjalanannya Amirullah Nur Saenong memutuskan untuk ikut maju dalam pertarungan Pilkada setelah berdiskusi dengan para tokoh, senior, keluarga dan berbagai elemen masyarakat. Alasan ketua DPC Partai Demokrat ini untuk ikut berkontestasi yakni saat ini Maros membutuhkan akselerasi percepatan pembangunan dan juga sumber daya manusia. Perlu diketahui bahwasanya saat Partai Demokrat hanya memiliki satu kursi di DPRD Maros, sehingga memiliki tuntutan yang sangat besar untuk bias mencukupi kursi pengusungannya. Tetapi Amirullah Nur, tetap melakukan komunikasi ke beberapa partai-partai yang lolos di DPRD Kabupaten Maros, diantaranya Partai Golkar, PKB, PKS, PPP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra, namun pada akhirnya urung untuk ikut berkontestasi dalam Pilkada. Selanjutnya, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) memberikan rekomendasi kepada Andi Tajerimin Nur-Havid S Fasha untuk ikut berkontestasi dalam Pilkada Maros. Dalam hal ini, Ketua PKB Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad mengatakan bahwa usungan PKB di Pilkada Maros 2020 karena beberapa pertimbangan, diantaranya karena Partai Golkar dan PKB sepakat dalam rangka melakukan perubahan dengan melawan petahana yang sudah sepuluh tahun berkuasa.

a. Pembahasan

1) Relasi politik penguasa dengan masyarakat

Selanjutnya dalam hal jejaring punggawa umumnya Calon Kepala Daerah berusaha untuk mereduksi dukungan suara

dalam rangka mengantongi suara dari basis penantangannya yang berada di 14 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Maros. Hampir sebagian besar komunitas masyarakat tersebar di sejumlah dusun, desa, kelurahan hingga kecamatan di Kabupaten Maros. Partai Golkar yang saat ini piawai dalam hal menarik perhatian pemilih di Kabupaten Maros juga dianggap sebagai sebuah peluang besar untuk meloloskan Calon Kepala Daerahnya. Sementara itu untuk Partai PAN sendiri, relasi politiknya dengan masyarakat dapat dikatakan sangat baik, mengingat saat ini Partai PAN adalah Partai pengusung dari Bupati H. Hatta Rahman dimana hubungan relasi yang saat ini masih mengakar di Kabupaten Maros. Sementara itu, untuk Partai Nasdem yang dikenal sebagai partai pendatang baru yang saat ini memulai debut kontestannya dengan hasil yang sangat memuaskan juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Mengingat Partai Nasdem mengusung Andi Harmil Mattotorrang dan Andi Ilham Nadjamuddin, juga dikenal memiliki relasi dengan masyarakat yang sangat baik, utamanya dari segi *punggawapolitik* yang mereka sudah bangun sebelumnya. Dapat dikatakan dari ketiga kontestan Calon Kepala Daerah Kabupaten Maros, semuanya masih memiliki kans untuk memenangkan Pertarungan Politikanya, mengingat kesemua pasangan ini terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dimana hal tersebut nampak masih lemahnya koordinasi politik diantara semua Tim Sukses dari setiap pasangan Calon Kepala Daerah yang akan berkontestasi.

Pada jejaring kelompok pemberdayaan masyarakat dimana pasangan Calon Kepala Daerah Andi Harmil Mattotorrang dan Andi Ilham Nadjamuddin ini memiliki jejaring yang kuat. Kekuatannya dapat dilihat dari distribusi dukungan yang terdapat di Kecamatan Lau dan Kecamatan Camba, Cenrana, Mallawa, Bantimurung dan Simbang. Mereka sudah membangun komunikasi politik dengan masyarakat khususnya komunitas pemberdayaan masyarakat. Disamping itu modal sosial dan modal politik yang dimiliki pasangan ini diharapkan mampu meraup suara diantara pasangan yang lainnya. Sementara itu untuk pasangan Chaidir Syam dan Suhartina Bohari juga memiliki modal sosial dan modal politik dalam jejaring kelompok masyarakat yang nampak pada Kecamatan Turikale, Mandai, Marusu, Tanralili, dan Moncongloe yang mereka anggap sebagai basis kekuatan dari pasangan yang menggunakan *tagline Hatikita*

Keren. Selanjutnya untuk pasangan Tajerimin dan Havid Fasha juga memiliki modal sosial dan modal politik dalam kelompok pemberdayaan masyarakat diantaranya berada di Kecamatan Marusu, Bantimurung, Simbang, Mallawa, Maros Utara dan Mandai. Pasangan sini juga masih optimis untuk memenangkan suaranya melalui jejaring komunitas pemberdayaan masyarakat yang terdapat di Kabupaten Maros.

2) *Relasi politik penguasa dengan partai politik*

Relasi politik seringkali kita sebut sebagai bentuk dukungan maupun yang memiliki kedekatan secara khusus dengan beberapa petinggi Partai Politik yang memiliki peran dalam mengambil kebijakan. Kedekatan-kedekatan maupun dukungan secara khusus yang dicontohkan dalam pendekatan politik maupun pendekatan secara terencana dan identik dengan balas budi, tidak pelak mendatangkan sebuah dampak kepada pembuatan kebijakan yang pada akhirnya hanya menguntungkan multiaktor. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian ANS (58 tahun) yang juga berprofesi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) salah satu Partai Politik yang juga mendukung salah satu pasangan Calon Kepala Daerah. Dalam hal ini untuk menjadi seorang Kepala Daerah khususnya di Kabupaten Maros tidak hanya mengandalkan idealisme saja dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, gagasan ide-ide untuk membangun kota, desa, maupun daerah. Visi dan Misi yang dijabarkan oleh tiap kandidat juga diperlukan adanya dukungan materil. Adany asumsi dasar bahwasanya untuk berkontestasi dalam proses Demokrasi hendaknya para Calon Kepala Daerah memiliki biaya politik (*cost politic*). Adanya pengeluaran yang disebut sebagai *costpolitik* dalam proses-proses tahapan di mana seseorang akan mengikuti proses-proses di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses itu meliputi pendaftaran, sosialisasi, kampanye yang membutuhkan materi yang tidak sedikit jumlahnya. Kondisi tersebut kemudian memunculkan beberapa asumsi, diantaranya; (1) orang-orang yang memiliki banyak duit; dan (2) orang yang bisa jadi tidak memiliki uang, namun relasi untuk jaringan ke Partai Politik telah terjadi deal-deal politik yang dilakukan sebelum proses deklarasi Calon Kepala Daerah. Situasi ini akan menjadi pintu masuk transaksi untuk menguasai seluruh sumber-sumber potensi daerah, potensi sumber daya alam dan

mereka meloloskan segala bentuk kepentingan kelompoknya.

Lebih lanjut, model ideal relasi Kepala Daerah dengan masyarakat dan politik dengan harapan menghindari perantim sukses dari salah satu pasangan pemenang Pemilihan Kepala Daerah guna menghindari terjadinya *patronklien*. Terciptanya *patronklien* disebabkan deadeal politik yang dilakukan oleh Calon Kepala Daerah sebelum memberikan dukungannya, sehingga menciptakan politik balas jasa yang disebabkan oleh Tim Sukses memberi jasa melalui bentuk dukungan suara kepada Calon Kepala Daerah. Kondisi hubungan pertukaran diantara Calon Kepala Daerah dengan Tim Sukses, terjadi karena Tim Sukses

kuat secara dukungan sumbangan suara, sementara Calon Kepala Daerah lemah secara dukungan yang mendukung dan menyukseskan kampanye politiknya, sehingga dia berkuasa maka dia kuat secara politik, sementara berbanding terbalik dengan Tim Sukses yang lemah secara politik. Kondisi ini yang membuat Tim Sukses untuk memberikan bantuan dukungan politiknya, dimana ketika Calon Kepala Daerah berhasil terpilih sebagai pemenang, maka secara langsung akan menciptakan kondisi *patron klien* yang seutuhnya. Untuk itu model ideal konstruksi hubungan Calon Kepala Daerah dengan pendukungnya disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Model ideal konstruksi hubungan Calon Kepala Daerah dengan pendukungnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dirumuskan dalam studi tentang relasi politik penguasa dan masyarakat pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Marostumbuh dan berkembang dalam dua dimensi, yakni; dimensi subjektif dan dimensi objektif. Kedua dimensi ini berpengaruh secara resiprokal dalam kontestasi pemilihan Calon Kepala Daerah.

Untuk dimensi subjektif terdapat melalui jalur relasi, yaitu; (1) jejaring aktor pemerintahan dan birokrasi; (2) jejaring punggawa; dan (3) jejaring kelompok pemberdayaan masyarakat. Ketiga jejaring ini dimanfaatkan oleh Calon Kepala Daerah untuk menggalang dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga dapat memenangkan kontestasi pemilihan.

Sementara dimensi objektif adalah relasi penguasa dengan partai politik diperoleh melalui dukungan modal materi dan modal sosial. Kedua dimensi tersebut nampak melalui hubungan pertukaran kepentingan diantara Calon Kepala Daerah dengan Tim Sukses, terjadi karena Tim Sukses kuat secara dukungan sumbangan suara, sementara Calon Kepala Daerah lemah secara dukungan yang mendukung dan menyukseskan kampanye politiknya, sehingga dia berkuasa maka dia kuat secara politik yang secara langsung akan menciptakan kondisi *patron klien* yang seutuhnya.

Bagi kalangan pemerintahan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia, selaku pemegang amanah rakyat yang didaulat menjalankan kekuasaan hendaknya menggunakan relasi politiknya yang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengedepankan edukasi politik yang bermartabat dan berintegritas. Hal ini untuk untuk mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan. Bagi kalangan akademisi hendaknya melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan yang meneliti masalah penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan pengusaha yang berperan dalam memberikan dukungan pada masa Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini dianggap penting, dikarenakan banyaknya terjadi penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala Daerah ketika membuat kebijakan yang cenderung menguntungkan kelompok pengusaha, sehingga terjadi pelanggaran tindak pidana Korupsi.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, I. 2016. *Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2 (1), 95-110. <http://journal.unpad.ac.id>.
- Amiruddin, A. 2017. *Pilkada Serentak Dan Potensi Konflik di Sulawesi-Selatan*. Jurnal Politik Profetik. 5 (1), 1-13. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/3297>
- Chaniago, P.S. 2016. *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. 1 (2), 196-211. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/6585/4950>
- Lisma dan Tyesta, L. ALW, 2017. *Implikasi Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional di Indonesia Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015*. Jurnal Law Reform. 13 (1). 86-97. <https://ejournal.undip.ac.id>
- Noor, F. 2018. *Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)*. Jurnal Penelitian Politik, 15 (2), 179-196. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/759/537>
- Nurhasim, M. 2018. *Koalisi "Nano-Nano" Pilkada Serentak 2018*. Jurnal Penelitian Politik, 15 (2), 129-142. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/760/534>
- Purwaningsih, T. 2015. *Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan*. Jurnal Politik, 1 (1), 97-123. <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/10>
- Romli, L. 2018. *Pilkada Langsung, Calon Tunggal dan Masa Depan Demokrasi Lokal*. Jurnal Penelitian Politik, 15 (2), 143-160. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/757/533>
- Sumandiyar, A. 2017a. *The Relation between Business and Authority: Maros Political Atmospheric Study in Indonesia*. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (4), 165-172. <http://archive.sciendo.com/MJSS/mjss.2018.8.issue-4-1/mjss-2018-0087/mjss-2018-0087.pdf>
- Sumandiyar, A. 2017b. *Atmosfer Politik (Relasi Penguasa dan Pengusaha Dalam Pembangunan di Indonesia)*. Literacy Institute. Kendari.
- Sumandiyar, A. 2017c. *Relasi Kuasa dan Perusahaan (Studi Ekologi Politik di Kawasan Karst Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Indonesia)*. Jurnal Ibnu Khaldun. Jilid 1 Vol.3. Hal. 208-224.
- Sumandiyar, A. 2018. *Relasi Penguasa dan Pengusaha (Studi Atmosfer Politik*

- Maros di
Indonesia). Jurnal. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/7155>
- Sumandiyar, A. dan Nur. H. 2019. *Penguasaan Reproduksi Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin*. Phinisi Integration Review, 2, (1), 001-008. <http://ojs.unm.ac.id/pir>.
- Sutisna, A. 2017. *Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. 2 (2) 100-120. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>
- Sutrisno, C. 2017. *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2 (2), 38-50. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/509>
- Syarifuddin, Abustam, I., Adam, A., & Sumandiyar, A. 2019. *Ethnic Hybridization (Socio-Cultural Study of maja Labu Dahu Bima Diaspora in Makassar City)*. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS). 24 (3) 31-35. <http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2024%20Issue3/Series-2/F2403023135.pdf>